

PENGARUH KOMITMEN PIMPINAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah)

Asri Fitriani

Asri_fitriani@ymail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research intends to describe the leaders' commitment, internal control environment, and the quality of financial statement; analyze the simultaneous influence of leaders' commitment and internal control environment on financial statement; determine and analyze the partial influence of internal control environment on financial statement in all regional government working units in central Sulawesi. The research applies verificative approach. Population includes all regional government working units in central Sulawesi. Data used is primary and secondary data based on questionnaire distributed to 43 leaders in government working units who selected by census method. The result concludes that leaders' commitment and internal control environment partially has significant influence on financial statement quality; internal control environment partially significant influence on financial statement quality in all government working units in central Sulawesi.

Keywords: *leaders' commitment, internal control environment, and financial statement quality*

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati, Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2), kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit

kerja. Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik : relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang memenuhi kriteria *good governance*, diperlukan adanya komitmen pimpinan. Komitmen memiliki arti lebih dari sekedar

loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya (Mowday, 1987 dalam Silviana, 2012). Kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah dengan harapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disusun pemda sudah wajar atau belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tentunya diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silviana, 2012 Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Komitmen kepala daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wendhi Adha (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Pengujian hipotesis Ketidakpastian Lingkungan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Komitmen Pimpinan dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan, pelaksanaan Otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik apabila memiliki pedoman dan sistem yang kuat untuk memastikan dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Pedoman dan sistem dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian

internal pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah.

Sistem pengendalian internal menurut Randal dan Alvin (2012:322) memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah. Elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu dari elemen sistem pengendalian internal tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) adalah komponen dalam sistem pengendalian intern pemerintah yang menjadi pondasi bagi komponen pengendalian lainnya. Oleh karenanya, efektivitas lingkungan pengendalian ini akan mempengaruhi pula efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan.

Komitmen terhadap kompetensi dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendorong adanya standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, organisasi

menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan secara berkelanjutan.

Lingkungan pengendalian internal merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. (www.bpkp.go.id).

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pimpinan dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, komitmen pimpinan juga mempunyai dampak pada kualitas laporan keuangan, sehingga diambilnya fokus pembahasan mengenai komitmen pimpinan dikarenakan apabila dilihat secara luas merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk dikembangkan dalam kinerja pemerintah daerah. Selain itu individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab akan bekerja keras untuk mencapai tujuan sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan signifikan Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pendidikan terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pelatihan Teknis Keuangan terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pengalaman Kerja terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Komitmen Pimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Lingkungan Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 52 SKPD. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 43 SKPD, karena 9 SKPD berupa Biro tidak membuat entitas pelaporan keuangan dan entitas akuntansi. Responden dalam penelitian ini yang merupakan entitas pelaporan adalah Pimpinan/Kepala SKPD atau unsur pimpinan (Sekretaris/Kasub Aset dan Keuangan).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili), Sugiyono (2014: 81). Sampel (responden) yang diambil pada saat dilakukan penelitian dengan jumlah populasi dan sampel seperti pada tabel berikut :

No	Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
3	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi
4	Sekretariat KPID
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
6	Dinas Kesehatan Daerah
7	Dinas Sosial Daerah
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
9	Dinas Perhubungan Daerah
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
11	Dinas Bina Marga Daerah
12	Dinas Sumber Daya Air Daerah
13	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah
14	Dinas Pendapatan Daerah
15	Dinas Pertanian Daerah
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah
17	Dinas Kehutanan Daerah
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah
22	Dinas Koperasi dan UMKM daerah
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
24	Dinas Perkebunan Daerah
25	Inspektorat Daerah
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
28	Badan Lingkungan Hidup Daerah
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah
30	Badan Ketahanan Pangan
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
32	Badan Kepegawaian Daerah
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
34	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
35	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
36	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
38	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
39	Rumah Sakit Umum Daerah Undata
40	Rumah Sakit Daerah Madani
41	Kantor Perwakilan Pemda
42	Badan Koordinasi Penyuluhan
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulteng, 2015

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh

dari hasil wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*) mengenai karakteristik responden. Penyebaran kuesioner disini merupakan metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara tertulis yang berisikan data tentang komitmen pimpinan, lingkungan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas antara lain laporan keuangan setiap SKPD, buku-buku acuan yang diperoleh dari studi pustaka dan berbagai artikel/jurnal.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Umi Narimawati (2008:5) analisis regresi linier berganda yaitu: “Suatu analisisa sosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval”.

Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

1. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Dimana:

Y=Kualitas laporan keuangan

a= Intersep (Konstanta)

b1, b2, b3 =Koefisien Regresi

X1= Pendidikan

X2=Pelatihan Teknis

X3=Pengalaman Kerja

e =Kesalahan pengganggu (*error term*)

3. Pengujian Hipotesis

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R^2).

komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 40 orang responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal) terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan

Tabel Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kualitas Laporan Keuangan				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	0,061	0,758	0,080	0,936
X ₁ = Komitmen Pimpinan	0,837	0,156	5,372	0,000
X ₂ =LingkunganPengendalian Internal	0,139	0,051	2,708	0,010
R-	= 0,691			
R-Square	= 0,477	F-Statistik	= 16,896	
Adjusted R-Square	= 0,449	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah: $Y = 0,061 + 0,837X_1 + 0,139X_2$

Persamaan tersebut menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X₁, dan X₂,) memberi pengaruh terhadap variabel dependen (Y) model analisis regresi kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Untuk nilai constanta sebesar 0,061 berarti kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal adalah sebesar 0,061.
2. Komitmen pimpinan (X₁) dengan koefisien regresi 0,837 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara komitmen pimpinan dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin berkomitmen pimpinan maka akan semakin

baik kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Lingkungan pengendalian internal (X₂) dengan koefisien regresi 0,139 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara lingkungan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik lingkungan pengendalian internal yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni komitmen ;pimpinan (X₁), dan lingkungan pengendalian internal (X₂), dengan variabel tidak bebasnya kualitas lapoaran

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yakni:

Dari Tabel 4.13 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,477 atau = 47,70%. Hal ini berarti bahwa sebesar 47,70% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.13 dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 16,896$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Dengan demikian maka hipotesis **pertama** yang menyatakan bahwa: Komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan (X_1)

Untuk variabel komitmen pimpinan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,837, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel komitmen pimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Komitmen pimpinan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

2. Lingkungan pengendalian internal (X_2)

Untuk variabel lingkungan pengendalian internal, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,139, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,010. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Lingkungan pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

Variabel penelitian pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan survei pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pembahasannya guna memperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut :

Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh hasil bahwa variabel komitmen pimpinan (X_1) dan lingkungan pengendalian internal (X_2) berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini membuktikan bahwa jika kualitas laporan keuangan akan tercapai apabila pimpinan menerapkan lingkungan pengendalian internal pada instansinya masing-masing.

Komitmen Pimpinan mempunyai arti penting bagi kelangsungan manajemen operasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

yang belum mendapatkan opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kepala SKPD dan seluruh jajarannya. Terkait opini LKPD, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. “Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. (Kurniawan, 2011)

Tanpa adanya komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilakukan seiring dengan pembentukan organisasi tersebut. Dengan dibentuknya organisasi sesuai kebutuhan maka wewenang dan tanggung jawab telah terdistribusi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi dan pengaturan tugas dan fungsinya masing-masing, namun penerapannya perlu lebih diefektifkan dalam menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukkan kondisi

yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (Tony, 2008:5).

Pengaruh Komitmen Pimpinan (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,837, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel komitmen pimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi penerapan komitmen pimpinan maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati (2013), yang menunjukkan bahwa komitmen manajer berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta hasil penelitian dari Silviana (2012) yaitu komitmen organisasi menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, artinya semakin tinggi tingkat komitmen pimpinan akan menyebabkan semakin tinggi kualitas LKPD.

Komitmen yang tinggi menjadikan pimpinan lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik, kunci utamanya dan yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rozmita dan Nelly (2012) bahwa peran manajemen puncak jauh lebih penting dalam upaya mendeteksi bahkan mencegah terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, apabila pimpinan di lingkungan instansi/lembaga memiliki komitmen yang tinggi maka akan tercipta perilaku yang positif

di lingkungan kerja dalam organisasi, dan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan sedapat mungkin diminimalisir.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat COSO, 2009 (dalam Silviana, 2012) Jika kinerja pimpinan organisasi baik, maka seluruh komponen akan menyatu dan saling menjalin (*permeated*) di dalam proses manajemen. COSO mengakui suatu "*tone on the top*", oleh karena itu pimpinan organisasi tetap ditekankan untuk mengambil peranan yang sangat penting dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan.

Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi menurut Trisnawingsih (2004) mengemukakan jika seseorang yang bergabung dengan suatu organisasi tentunya membawa keinginan-keinginan, kebutuhan dan pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja baginya, bersama-sama dengan organisasinya berusaha mencapai tujuan bersama dan untuk bekerja sama dan berprestasi kerja dengan baik, seorang harus mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasinya.

Pengaruh Variabel Lingkungan Pengendalian (X_2), terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Satuan kerja yang bertugas secara teknis dan terkait langsung dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah melaksanakan aspek-aspek atau kegiatan yang dapat membangun lingkungan pengendalian, yaitu penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Penegakan integritas dan nilai etika secara eksplisit atau nyata diwujudkan dalam rangka menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Selain itu penegakan integritas diwujudkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa melalui penandatanganan pakta integritas antara panitia pengadaan barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi kedisiplinan dan struktur dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Di dalam lingkungan pengendalian dituntut orang-orang yang kompeten, memahami tanggung jawab dan batasan wewenangnya, mempunyai komitmen dalam mematuhi kebijakan dan standar etika perilaku organisasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel lingkungan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliati (2012) dan Nini Andriani (2014), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Baihaqi (2004) dalam Sari dan Raharja (2012) bahwa pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.

Lingkungan pengendalian yang sehat mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan, dimana lingkungan pengendalian yang sehat merupakan pilar utama untuk mendorong terlaksananya unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan lingkungan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Lingkungan pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak - pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan bagi peneliti selanjutnya, oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD diharapkan mampu meningkatkan komitmen terhadap organisasinya dengan cara melakukan rapat-rapat rutin bersama kepala bidang dan kepala seksi/sub bidang dalam membahas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mampu meningkatkan loyalitas kepada organisasinya/instansinya.
2. Pembinaan sumber daya manusia pada pengelola keuangan dalam bentuk pelatihan dan seminar perlu dilakukan terus menerus mengingat latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh beberapa pengelola keuangan bukan berasal dari bidang keuangan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas hasil penelitian-penelitian

sebelumnya dengan lebih memperbesar sampel yang diteliti, dan mengidentifikasi variabel lain seperti budaya kerja, pelatihan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, audit eksternal, implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis akui bahwa dalam penyusunan artikel ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si. dan Anggota Tim Pembimbing Prof. Dr. Ridwan, S.E., M.Si., Ak.,CA. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- <http://www.bpkp.go.id>. LKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 15 Juni 2016 jam 23.30 Wita.
- <http://www.sultengprov.go.id>. Gambaran umum Provinsi Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 20 Juni 2016 jam 19.30 Wita.
- Kurniawan Selamat. 2011. BPK RI Beri Opini WDP terhadap LKPD Enam Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar. *Siaran Pers Penyerahan LHP-LKPD TA 2010*. Juli 2011. Bandung
- Muliati. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. *Tesis*. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Nini Andriani, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Audit Internal Sebagai Variabel Moderating

- pada Universitas Tadulako. *Tesis*. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Santoso, P. R.. dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Setiyawati. Hari. 2013 *Pengaruh Kompetensi Akuntan Internal, Komitmen Manajer untuk Organisasi, dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. International Journal of Business and Management Invention*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Silviana, 2012. *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat*. Bandung : Universitas Widyatama.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Edisi ke-12. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Yudianta dan Erawati, 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Bali. Universitas Udayana